KERANGKA BERPIKIR

Fenomena

-Pelayanan publik belum efisien

-Transparansi & akuntabilitas masih lemah

-Kepercayaan publik rendah

Kebijakan/peraturan

-UU No. 25/2009 Pelayanan Publik

-Perpres No. 95/2018 SPBE

Faktor-faktor di lokus

-Infrastktur digital

-Kompetensi aparatur

-Transparansi & akuntabilitas

-Partisipasi masyarakat

-Etika & perlindungan data

Lokus penelitian

Administrasi Publik Indonesia (E-Government & Good Governance) untuk pembangunan berkelanjutan

Teori Administrasi Publik & Governance:

-Pergeseran paradigma OPA -> NPM -> NPS

-Teori E-Government

-Teori Good Governance

Kondisi ideal

-Administrasi Publik digital yang inklusif, transparan, akuntabel, efektif.

-Kepercayaan publik meningkat

-Mendukung tercapainya SDGs